

## RAJA, KARAWITAN, DAN UPACARA TRADISI KERATON SURAKARTA

**Joko Daryanto**

Universitas Sebelas Maret Surakarta  
Jalan Ir. Sutami No. 36A Surakarta 57126

### **Abstract**

*Karawitan (gamelan music and singing accompanied by a gamelan) is an integral part of court activities. The very large role of karawitan makes the court karawitan an integral part of court traditional life. The large role of court karawitan is closely related to the traditional ceremonies. The importance of karawitan in the court traditional life finally makes the karawitan one of power legitimacy tools to confirm the king's power and authority. Thus, there is a unity between the court tradition and karawitan, in other words, karawitan cannot be apart from the court tradition. In other words there is reciprocal and mutual relation between the king, karawitan and court tradition. Such relationship between king, karawitan and court tradition is called system. It is named system because there is a strong reciprocal relationship and the loss of one such element will harm the court traditional life survival.*

**Keywords :** king, karawitan, court tradition, system

### **Abstrak**

Karawitan merupakan bagian integral dari berbagai kegiatan kerajaan. Peran besar yang dimainkan oleh karawitan telah menjadikan karawitan dari keraton sebagai bagian integral kehidupan tradisional di keraton. Peran karawitan tersebut berkaitan erat dengan upacara-upacara tradisional. Pentingnya karawitan dalam kehidupan tradisional di keraton menjadikan karawitan salah satu alat legitimasi yang memperkuat kekuasaan dan wibawa raja. Dengan demikian, terdapat suatu kesatuan di antara tradisi keraton dan karawitan. Dengan kata lain, terdapat hubungan timbal balik dan saling menguntungkan di antara raja, karawitan, dan tradisi keraton. Hubungan ini di antara raja, karawitan, dan keraton disebut suatu sistem. Disebut demikian karena terdapat hubungan timbal balik yang kuat sehingga apabila salah satu unsur tidak ada, keberlangsungan kehidupan tradisional di keraton terancam punah.

**Kata kunci:** raja, karawitan, tradisi keraton, sistem

### **Pendahuluan**

Keraton surakarta yang merupakan salah satu peninggalan Dinasti Mataram sampai saat ini keberadaannya masih cukup kuat, selain ditunjang dengan bangunan fisik yang masih cukup megah, juga ditunjang dengan

adat-istiadat, upacara, dan tata cara pergaulan sehari-hari yang masih berlaku di lingkungan keraton. Beberapa upacara tradisi keraton masih dilaksanakan pada hari-hari tertentu serta melibatkan karawitan di dalamnya, bahkan karawitan menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau

menjadi bagian terpenting dalam sebuah upacara tradisi keraton. Aktifitas karawitan di Keraton Surakarta sebenarnya sudah berlangsung sejak pemerintahan Paku Buwana II. Pradjapangrawit melaporkan pada masa itu sudah tercipta 17 gendhing baik gendhing untuk keperluan klenengan<sup>1</sup> maupun karawitan tari<sup>2</sup> (Pradjapangrawit, 1990: 85-86). Dengan demikian, tidak berlebihan jika Keraton Surakarta dianggap sebagai kiblat dalam penyajian karawitan karena keberadaannya yang mapan, mentradisi, dan bahkan bersifat klasik. Dapat dikatakan pula bahwa Keraton Surakarta merupakan pusat sumber *garap* karawitan, hal ini dikarenakan dalam sejarahnya, karawitan keraton mampu menyajikan karawitan dengan konsep estetika dan etika tradisi keraton yang berlaku sejak ratusan tahun silam (Rustopo, 1995: 3).

Sampai saat ini, karawitan di Keraton Surakarta selalu hadir sebagai pelengkap upacara-upacara tradisi keluarga seperti *tingalan wiyosan*<sup>3</sup>, khitanan, ataupun  *mantu* (pernikahan), juga upacara-upacara tradisi keraton yang lain, seperti  *garebeg*<sup>4</sup>,  *selikuran*<sup>5</sup>,  *sekaten*<sup>6</sup>,  *tingalan jumenengan*<sup>7</sup>, peringatan 1 Sura,  *Jumenengan Nata* atau upacara penobatan raja. Beberapa upacara tersebut merupakan upacara tahunan, seperti  *garebeg*,  *selikuran*, ataupun  *sekaten*. Sedangkan upacara  *Jumenengan Nata*, diselenggarakan jika terjadi pergantian kepemimpinan di keraton. Begitu

pentingnya kehadiran karawitan dalam sebuah upacara tradisi keraton sehingga dapat dikatakan bahwa kehadiran seni karawitan (musik) merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam upacara-upacara tradisi keraton (Rustopo, 2007: 81).

Salah satu upacara tradisi keraton yang diselenggarakan untuk menunjukkan kebesaran kekuasaan seorang raja adalah upacara  *Jumenengan Nata*. Sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf sebelumnya, bahwa upacara ini merupakan sebuah upacara yang menandai terjadinya pergantian kepemimpinan (raja) di keraton, maka tidak mengherankan jika semua potensi keraton termasuk di dalamnya seperti gamelan turut dikeluarkan. Pengerahan semua perangkat upacara termasuk gamelan yang dianggap sebagai gamelan pusaka dikeluarkan sebagai kelengkapan upacara, hal ini menunjukkan begitu pentingnya upacara  *Jumenengan Nata* bagi kelangsungan hidup keraton. Pentingnya upacara ini diduga ada kaitannya dengan masa depan keraton karena seseorang yang dinobatkan menjadi raja diharapkan mampu membawa keraton ke arah yang lebih baik.

Tidak kurang dari sepuluh perangkat gamelan yang terdiri dari tiga perangkat gamelan ageng dan tujuh perangkat gamelan pakurmatan ditempatkan di sembilan titik berdasarkan strata masing-masing perangkat gamelan. Dilihat dari fungsi atau usia gamelan keraton, ada perbedaan strata masing-

masing perangkat gamelan di karaton. Stratifikasi pada gamelan karaton dapat dilihat pada fungsi masing-masing gamelan. Beberapa gamelan hanya boleh dibunyikan pada saat-saat tertentu, namun sebagian perangkat gamelan bebas dibunyikan dengan tidak terikat pada fungsi dan hari tertentu. Dalam upacara *Jumenengan Nata* semua perangkat gamelan baik gamelan pusaka maupun gamelan *padintenan*<sup>9</sup> dikeluarkan untuk mendukung upacara *Jumenengan Nata*.

Dapat dibayangkan kemeriahan dan kemegahan upacara *Jumenengan Nata* karena melibatkan berbagai perangkat gamelan serta pengrawit dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, di balik kemegahan dan kebesaran upacara *Jumenengan Nata*, ada sisi lain yang sangat bertolak belakang dengan kemegahan upacara itu. Pada saat ini, Keraton Surakarta tidak lagi memiliki otoritas politik, wilayah kerajaan dengan segala kekuasaannya menjadi sekedar cagar budaya. Keraton hanyalah tempat tinggal raja beserta keluarganya. Apalagi dengan terbitnya Keppres no 23/1988 tentang status pengelolaan keraton maka raja hanyalah sebagai kepala kerabat dan pimpinan istana. Masyarakat Jawa pada umumnya menyebut wilayah kekuasaan dan wewenang keraton saat ini dengan sebutan *gari sak megaring payung*<sup>9</sup>

Penobatan raja yang melibatkan berbagai perangkat gamelan beserta pengrawit dalam jumlah yang besar di

samping pendukung upacara yang lain, jika dikaitkan dengan kondisi keraton pada saat ini dapat dikatakan sangat bertolak belakang. Hal ini dikarenakan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki raja saat ini sangat jauh berbeda jika dibandingkan ketika raja masih memiliki wewenang penuh. Jika pada masa kerajaan, raja merupakan kepala pemerintahan dan memiliki segalanya, namun pada saat ini raja Keraton Surakarta hanyalah kepala adat bagi komunitas Keraton. Situasi seperti tersebut di atas akhirnya memunculkan pertanyaan mengapa dalam situasi dan kondisi yang demikian upacara *Jumenengan Nata* (penobatan raja) masih dilaksanakan secara besar-besaran? Pertanyaan inilah yang akhirnya menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini.

Sebagai kerajaan yang masih utuh baik secara fisik maupun non fisik, Keraton Surakarta tentu membutuhkan seorang pemimpin kerajaan yang bertahta. Tanpa raja upacara-upacara adat, seperti *garebeg*, *sekaten*, *selikuran*, kirab pusaka, dan lain-lain yang melibatkan karawitan di dalamnya tidak mungkin dilaksanakan. Meskipun secara politis tidak lagi memiliki kekuasaan, sosok raja mesti harus ada sebagai panutan, pemangku adat ataupun simbol filosofi yang selama ratusan tahun sudah berlangsung. Upacara-upacara tersebut jika tidak berlangsung maka karawitan keraton tidak akan memiliki fungsi sosial yang sangat penting. Sehingga dapat dikata-

kan sepanjang raja masih ada, maka kehidupan tradisi keraton akan tetap terlaksana, dengan hidupnya upacara tradisi keraton, maka karawitan keraton juga mendapatkan tempat untuk berpijak. Dengan demikian, antara raja sebagai pemangku adat dan karawitan memiliki peran dan fungsi yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara raja dan karawitan sekiranya dapat diuraikan dengan pendekatan fungsional. Asumsi pendekatan fungsional yang menyatakan bahwa semua sistem memiliki fungsi tertentu yang memungkinkan sistem itu keberadaannya terjaga dapat digunakan sebagai pijakan dalam menguraikan hubungan antara karawitan dan raja di Keraton Surakarta. Dalam sebuah sistem pemerintahan kerajaan (dalam hal ini adalah Keraton Surakarta) antara raja dan karawitan tidak sekedar saling berhubungan. Lebih dari itu antara raja dan karawitan saling memberi andil bagi pemeliharaan, stabilitas, dan kelestarian antara keduanya.

Karawitan dan raja di Keraton Surakarta merupakan dua hal yang saling berhubungan sehingga pada akhirnya membentuk sebuah sistem. Dikatakan sebagai sistem karena antara karawitan dan raja merupakan dua sisi yang saling mengisi dan memiliki ketergantungan satu dengan yang lain. Dalam kehidupan tradisi keraton yang dipimpin oleh raja, peran karawitan sangatlah besar hingga kehadirannya sangat diperlukan. Namun demikian, karawitan keraton tidak akan terlihat

perannya jika tidak didukung keberadaan raja. Dengan kata lain, karawitan keraton memiliki fungsi yang vital dalam kehidupan tradisi keraton.

Teori fungsi yang berkaitan dengan kebudayaan, seperti yang diungkapkan oleh Malinowski, bahwa semua aktivitas kebudayaan pada dasarnya bertujuan untuk memuaskan rangkaian kebutuhan naluri manusia yang berkaitan dengan aspek kehidupannya. Aktivitas kebudayaan manusia akhirnya menjadi bervariasi dengan berbagai kombinasi dari beberapa *human need* (Koentjaraningrat, 1987: 32). Kesenian termasuk di dalamnya karawitan yang merupakan bagian dari kebudayaan, tentu saja memiliki nilai guna sehingga karawitan di keraton Surakarta sampai saat ini masih memiliki peran penting terutama dalam upacara-upacara tradisi keraton yang melibatkan karawitan di dalamnya.

Kehadiran karawitan dalam upacara tradisi keraton mengisyaratkan adanya fungsi musik (karawitan) dalam konteks kebudayaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Merriam, yang menyatakan bahwa fungsi musik dalam konteks kebudayaan terbagi dalam lima kategori, yaitu sebagai penghayatan estetis, hiburan, komunikasi, perlambangan, reaksi fisik yang berkaitan dengan norma-norma sosial, dan upacara agama serta pengintegrasian masyarakat, (1964: 223-227). Karena penelitian ini berkaitan dengan fungsi karawitan dalam konteks kebudayaan Keraton, maka pendekat-

an fungsional digunakan untuk mendekati fungsi gamelan dan gending dalam upacara *Jumenengan Nata*.

Pendekatan fungsional mengenal dua fungsi, yaitu fungsi nyata (*manifest*) dan fungsi tersembunyi (*latent*). Fungsi manifest merupakan konsekuensi obyektif yang memberikan sumbangan pada penyesuaian sistem yang dikehendaki dan disadari oleh partisipan sistem tersebut. Sedangkan fungsi *latent* adalah konsekuensi obyektif dari suatu ihwal budaya yang tidak dikehendaki maupun disadari oleh warga masyarakat setempat (Merton, 2007: 141). Fungsi *manifest* digunakan untuk menguraikan bagaimana gamelan dan gending difungsikan sebagai alat kelengkapan upacara, sedangkan fungsi *latent* digunakan untuk menguraikan bagaimana peran gamelan dan gending yang berhubungan dengan kedudukan raja.

Penelitian tentang karawitan *Jumenengan Nata* dilakukan untuk mengungkap berbagai hal tentang upacara *Jumenengan Nata* serta mencari faktor-faktor yang menyebabkan upacara *Jumenengan Nata* masih dilaksanakan pada masa sekarang. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan bagi siapa saja yang berminat mempelajari aspek-aspek yang mengitari keberadaan upacara tradisi karaton. Penelitian tentang karawitan *Jumenengan Nata* dilakukan melalui tiga cara dalam mengumpulkan data, yaitu *partisipan observer*, wawancara, dan studi pustaka. Karena pe-

nelitian ini menggunakan pendekatan fungsional berdasarkan pandangan atau wawasan pemilik budaya, maka *partisipan observer* sangat diperlukan. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengrawit dalam upacara *Jumenengan Nata*.

## Pembahasan

### 1. Raja

Seorang raja memiliki wilayah kekuasaan yang dapat disamakan dengan negara pada saat ini. Pada masa kerajaan seorang raja dapat disamakan kedudukannya dengan kepala negara pada masa sekarang. Pengertian negara pada saat ini dapat disamakan dengan kerajaan pada masa lalu, maka kedudukan seorang raja pada masa kerajaan dapat disamakan dengan kedudukan kepala negara pada masa sekarang. Sebuah negara dapat diidentikkan dengan sebuah lembaga, atau dengan kata lain negara adalah lembaga, tempat raja memiliki dan mempertahankan kekuasaannya atas semua orang dan barang (Moertono, 1985: 5). Kerajaan-kerajaan di Jawa mengenal konsep kekuasaan raja adalah mutlak (*absolut*), di mana raja adalah segala-galanya. Raja memiliki kekuasaan yang sangat besar, tidak hanya rakyatnya tetapi juga harta bendanya. Raja juga dianggap *wenang wisesa ing sanagari* (yang berwenang tertinggi di seluruh negeri) sehingga seorang rakyat harus *ndherek kersa*

*dalem* (mengikuti apa kehendak raja). Sedemikian besarnya kekuasaan seorang raja, maka tidak menutup kemungkinan seorang raja secara pribadi dapat bertindak dengan cara tersendiri kemudian menetapkan dirinya dalam suatu peran serta menyatakannya sebagai tindakan yang direstui nenek moyang atau Tuhan (Apter, 2003: 17).

Kerajaan-kerajaan di Jawa juga mengenal adanya *sistem patrimonial*, yaitu konsep pewarisan menurut garis sang ayah. Dalam sistem ini, pewarisan kekuasaan dari nenek moyang lebih mementingkan laki-laki daripada perempuan. Konsep pewarisan merupakan salah satu ciri birokrasi Mataram, hal inilah yang menyebabkan kekuasaan dalam Dinasti Mataram sampai sekarang berada di tangan pendiri kerajaan dan keturunannya. Sistem ini kemudian menjadi titik awal perkembangan sistem politik *monarchy* atau kerajaan. *Monarch* adalah raja, orang yang derajatnya di atas yang lain memiliki kehormatan karena berasal dari derajat yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan orang kebanyakan (G Moedjanto, 2002: 161). Karena raja memiliki kehormatan dan derajat yang lebih tinggi maka raja dianut oleh rakyatnya, ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dan dijadikan teladan bagi semua *kawula* (rakyat) yang akhirnya menempatkan raja sebagai penguasa tunggal. Pemahaman tersebut akhirnya membawa sebuah konsekuensi kepemimpinan negara

yang kekuasaannya terpusat pada seorang raja (Sedyawati, 2001: 21).

Persoalan kecakapan memimpin keraton dengan segala pernik-perniknya merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang calon raja, sehingga seorang anak raja yang telah diangkat menjadi putra mahkota harus benar-benar mempersiapkan dirinya dengan baik. Hal ini dilakukan jika sewaktu-waktu terjadi proses pergantian kepemimpinan, maka suksesi dapat berjalan normal karena putra mahkota benar-benar siap menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Pada umumnya, yang berhak naik tahta adalah putra mahkota yang biasa disebut *Kanjeng Pangeran Adipati Anom*, yaitu putra raja yang dilahirkan dari istri permaisuri. Akan tetapi, sering pula terjadi saudara-saudaranya terutama yang dilahirkan dari selir, mungkin usianya lebih tua atau lebih pandai. Putra mahkota yang merupakan putra tertua raja dengan permaisuri disepakati sebagai orang yang paling berhak atas tahta keraton jika raja wafat.

Namun demikian, jika raja tidak memiliki permaisuri maka yang diberi kedudukan sebagai pengganti adalah adik raja yang lahir dari permaisuri. Jika adik yang dimaksudkan tidak ada, maka yang berhak adalah paman raja yang lahir dari permaisuri, jika paman ini tidak ada maka kedudukan diberikan kepada putra sulung raja dari seorang selir (Soeratman, 2000: 62).



Meskipun ada rambu-rambu dalam penetapan pengganti raja akan tetapi tidak jarang terjadi perseteruan atau intrik yang menjurus ke konflik internal keraton hampir selalu terjadi. Hal ini bukanlah barang baru dalam sejarah Dinasti Mataram. Sejarah mencatat sebelum peristiwa *palihan nagari*. Mataram telah mengalami tiga peristiwa besar dalam proses alih kepemimpinan. Peristiwa besar itu adalah perebutan tahta atau sering disebut dengan perang suksesi. Perebutan tahta terjadi pada saat mangkatnya Amangkurat I (1705-1708), mangkatnya Paku Buwana I (1719-1728), serta mangkatnya Paku Buwana II (1746-1757). Setelah Perjanjian Giyanti ditandatangani pada tahun 1755 permasalahan pengganti raja muncul ketika Paku Buwana V (1820-1823) wafat tanpa meninggalkan keturunan laki-laki yang lahir dari permaisuri, akan tetapi masalah ini selesai karena campur tangan pihak Belanda (Soeratman, 2000: 62-63). Sampai bertahtanya Paku Buwana XIII mekanisme pergantian kekuasaan tidak sepenuhnya berjalan lancar mengikuti hukum adat waris yang ada. Hal ini dikarenakan tidak setiap raja mengangkat putra mahkota secara resmi.

## 2. Upacara Tradisi Kerajaan

Keraton Surakarta sebagai salah satu penerus Dinasti Mataram, sampai saat ini masih menyelenggarakan berbagai macam upacara tradisi

keraton. Penyelenggaraan upacara di keraton didasarkan pada perhitungan kalender Jawa, oleh karena itu ada beberapa upacara yang rutin diselenggarakan tiap tahun. Selain upacara yang diselenggarakan secara rutin, beberapa upacara terutama upacara tradisi keluarga, tidak diselenggarakan secara rutin. Upacara-upacara yang diselenggarakan di Keraton Surakarta dapat digunakan sebagai petunjuk bahwa upacara tradisi di keraton masih dipelihara kelangsungannya. Bahkan dalam kurun waktu tertentu, sebuah upacara tradisi keraton dilaksanakan secara besar-besaran, misalnya upacara *Garebeg Mulud* pada tahun *Dal*. Penyelenggaraan upacara secara besar-besaran ini diduga sebagai sarana untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Keraton masih hidup dengan berbagai upacara tradisi yang dimiliki.

Penyelenggaraan upacara tradisi Keraton, baik yang dilaksanakan dengan sederhana maupun besar-besaran sangat berkaitan dengan usaha untuk menunjukkan kebesaran raja beserta perangkat pendukungnya. Dengan cara ini diharapkan kewibawaan keraton serta kedudukan raja diakui oleh masyarakat meskipun secara politis raja di Keraton Surakarta tidak memiliki kekuasaan. Namun demikian, melalui penyelenggaraan upacara tradisi, kewibawaan Keraton Surakarta dapat ditunjukkan kepada masyarakat. Kebesaran sebuah upacara sangat berkaitan dengan kultus kemegahan,

hal ini dikarenakan kultus kemegahan merupakan cara yang paling penting dan manjur untuk me-ningkatkan kewibawaan (Moertono, 1985: 72).

Secara garis besar upacara yang dilangsungkan di Keraton dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang bersifat intern, dan kedua, kelompok upacara yang dihadiri oleh wakil pemerintah Hindia Belanda di Surakarta (Soeratman, 2000: 125). Kelompok upacara intern diantaranya, adalah upacara makan siang dan malam bagi raja dan keluarganya, upacara penghadapan pada hari Senin dan Kamis, ulang tahun raja, ulang tahun *pawukon*<sup>9</sup> raja, ulang tahun permaisuri raja, selamat *mahesa lawung*<sup>10</sup>, *ngabekten*<sup>11</sup>, dan pemujaan terhadap kekuatan alam (Soeratman, 2000: 125-126). Sedangkan upacara yang dihadiri oleh wakil pemerintah Hindia Belanda, Soeratman menyebut upacara *Garebeg*, ulang tahun penobatan raja, *tedhak loji*, dan upacara penobatan raja.

Beberapa upacara yang disebutkan oleh Soeratman saat ini tidak diselenggarakan dan tentu saja tidak melibatkan pemerintah Hindia Belanda. Namun demikian, beberapa upacara tradisi Keraton masih diselenggarakan secara rutin oleh Keraton Surakarta. Hal ini dikarenakan perangkat dan pendukung upacara tradisi keraton masih memenuhi syarat bagi terselenggaranya sebuah upacara. Pada masa sekarang klasifikasi upacara tradisi keraton kiranya dapat diper-

barui mengingat keraton masih menyelenggarakan upacara tradisi dalam situasi dan kondisi yang sangat berbeda dengan masa kejayaan keraton. Jika melihat situasi sekarang, maka upacara tradisi keraton dapat diklasifikasikan menjadi upacara tradisi keluarga serta upacara kenegaraan.<sup>12</sup> Termasuk dalam kategori upacara tradisi keluarga diantaranya, adalah *wiyosan*, khitanan, *tingalan nDalem*, pernikahan putra-putri raja, dan *tedhak siten*. Sedangkan yang diklasifikasikan sebagai upacara kenegaraan, adalah *Garebeg*, *Selikuran*, *Sekaten*, *Tingalan Jumenengan*, dan *Jumenengan Nata*.

Kehadiran karawitan dalam upacara tradisi Keraton sangat berkaitan dengan upaya legitimasi kekuasaan untuk memperkuat kedudukan dan kewibawaan raja. Dapat dikatakan, antara upacara tradisi keraton dengan karawitan merupakan satu kesatuan, dengan kata lain karawitan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upacara tradisi keraton. Dalam sebuah upacara tradisi keraton, hampir setiap tahapan upacara akan terdengar alunan bunyi gamelan, hal inilah yang menyebabkan karawitan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upacara tradisi Keraton. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa karawitan menduduki peran sentral dalam kehidupan tradisi keraton. Hampir semua upacara tradisi keraton menggunakan karawitan sebagai salah satu perangkat atau kelengkapan upacara, dengan hadirnya karawitan



dalam sebuah upacara dapat dibayangkan kemegahan dan kemeriahan sebuah upacara yang diselenggarakan oleh keraton. Hal ini dikarenakan dalam sebuah upacara gamelan yang dilibatkan untuk mendukung upacara tidak hanya satu perangkat gamelan, minimal tiga perangkat gamelan baik gamelan pakurmatan maupun gamelan ageng.

### 3. Karawitan Sebagai Perangkat Upacara

Fungsi sosial karawitan di keraton pada akhirnya menjadikan karawitan tidak sebatas alat legitimasi raja, melainkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah upacara tradisi keraton. Dalam sebuah upacara tradisi keraton gamelan ditempatkan di titik-titik penting, baik untuk keperluan prosesi maupun *manguyu-uyu* sebelum upacara dimulai. Kehadiran karawitan tidak sekedar pengantar, pengiring ataupun sekedar menyemarakkan suasana sebuah upacara. Lebih dari itu, karawitan melalui alunan gending yang dibunyikan *abdi dalem niyaga*, maupun perangkat gamelan yang digunakan dalam sebuah upacara merupakan simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. Hal inilah yang menyebabkan dalam sebuah upacara baik gending yang dibunyikan maupun perangkat gamelan yang digunakan tidak sama antara upacara yang satu dengan upacara yang lain.

Upacara tradisi yang diselenggarakan di keraton mayoritas mengguna-

kan karawitan sebagai salah satu perangkat upacara. Seperti telah dipaparkan dalam paragraf di atas, kehadiran karawitan dalam sebuah upacara sangat berkaitan dengan fungsi sosial karawitan keraton. Namun demikian, ada juga beberapa upacara tradisi keraton yang tidak menggunakan karawitan sebagai salah satu perangkat upacara. Upacara itu di antaranya adalah *Wilujengan Mahesa Lawung, Jamasan, dan Labuhan*. Sedangkan upacara tradisi keraton, yang menggunakan karawitan sebagai salah satu perangkat upacara di antaranya adalah *Garebeg, Sekatenan, Tingalan Jumenengan, Selikuran, dan peringatan 1 Suro*.

### 4. Raja dan Karawitan Keraton

Sejak tahun 1743 meskipun Kartasura dapat direbut kembali oleh Paku Buwana II, kolonialisme masih melanjutkan usahanya merongrong kewibawaan raja dengan segala macam bentuk intervensinya. Justru pada saat ini era intervensi tanpa etika dimulai oleh pemerintah kolonial Belanda. Keberhasilan Belanda membantu Paku Buwana II mengusir pemberontakan Mas Garendi mengharuskan Paku Buwana II memberikan konsesi terhadap Belanda. Dimulai pada saat inilah, Belanda mulai melakukan *kooptasi* yang menjurus pada politik *divide et impera*. Puncaknya adalah pecahnya Mataram menjadi dua yaitu Surakarta dan Yogyakarta yang dikenal dengan peristiwa *palihan negari*.

Intervensi tanpa etika sangat tidak memungkinkan dilawan dengan kekuatan senjata oleh raja-raja Surakarta. Kelicikan dan kelengkapan senjata tentara kolonial Belanda sulit dihadapi oleh prajurit keraton dan senjata serta taktik perang tradisional. Untuk itu, diperlukan konsentrasi budaya sebagai bagian dari katarsis kedaulatan agar tidak terseret dalam konflik fisik yang dapat membawa keraton dalam situasi kekacauan serta menambah beban penderitaan rakyat.

Kecintaan raja-raja Surakarta akan kedamaian menjadikan setiap raja yang berkuasa memberikan perhatian penuh pada intensitas pertumbuhan dan perkembangan kesenian. Maka tumbuhlah beberapa entitas budaya sebagai kenyataan *woh pangolahing budi* dari para pujangga dan seniman keraton yang mendapat restu sepenuhnya dari raja. Karawitan, tari, pakeliran, dan kesusastraan keraton dianggap sebagai sumbu Keraton Surakarta. Dari sekian banyak elemen kebudayaan yang berperan, karawitan merupakan salah satu entitas yang relatif dominan. Karawitan merupakan unsur *mainstream* bagi Keraton Surakarta dalam pembentukan wujud kebudayaan Jawa, di samping itu karawitan yang hidup dan berkembang di Keraton banyak mewarnai kekhasan tata nilai dan aura budaya Jawa. Bunyi-bunyi yang dihasilkan dari instrumen gamelan berperan besar dalam pembentukan kekhasan atmosfer budaya. Melalui berbagai jenis perangkat gamelan serta komposisi musiknya

karawitan mampu mewakili kewibawaan dan cita rasa Jawa.

Masyarakat Jawa pada umumnya mengidolakan budaya *alus*<sup>13</sup> seperti yang sering diperlihatkan dalam kehidupan priyayi. Kehidupan priyayi selalu dikaitkan dengan para bangsawan dan *abdi dalem* di kalangan Keraton Surakarta. Dalam kehidupan masyarakat priyayi terdapat sejumlah aturan yang sangat rumit dan kompleks, sehingga pada saat itu status sebagai priyayi sangat dihormati. Karawitan klasik yang merupakan salah satu produk budaya Jawa memiliki sistem dan kaidah yang dipahami oleh masyarakat karawitan sebagai hukum-hukum karawitan. Selain itu, karawitan Jawa juga memiliki ciri *alus*, dapat dikatakan bahwa karawitan merupakan refleksi kebudayaan Jawa yang mengidolakan budaya *alus* (Waridi, 2006: 72). Karawitan sebagai manifestasi budaya *alus* hidup subur dan berkembang di lingkungan keraton yang dianggap sebagai sumber budaya *alus*. Kebudayaan keraton yang digolongkan dalam budaya *alus* penuh dengan simbol-simbol yang kompleks dan rumit, hal inilah yang diwariskan oleh para bangsawan dan masyarakat keraton. Dapat dikatakan bahwa budaya *alus* yang sarat dengan simbol-simbol yang kompleks dan rumit merupakan representasi alam pikiran raja dan para bangsawan Keraton.

Kayam melukiskan dengan kalimat di *krajan gedhe*<sup>14</sup> Sang Raja yang duduk bertahta menjadi pusat keseluruhan kosmos dan menciptakan

ekspresi seni dan budaya halus (1981: 26). Maka tidak mengherankan jika karawitan yang merupakan representasi budaya *alus* hidup dan berkembang di keraton. Karena karawitan Keraton merupakan representasi alam pikiran raja yang akhirnya menghasilkan budaya *alus*, maka karawitan Keraton sebagai *mainstream* dari kebudayaan keraton menjadi sumber acuan garap karawitan yang rumit (*ngrawit*) dan halus. Hal ini dikarenakan pelaksanaan garap karawitan keraton didasarkan atas konsep etika dan estetika keraton yang berlaku sejak ratusan tahun silam. Garap karawitan yang rumit (*ngrawit*) itu selanjutnya dipelihara, dilaksanakan, dan dikembangkan tidak hanya di lingkungan istana melainkan juga di kalangan rakyat. Masyarakat kebanyakan pada umumnya beranggapan bahwa kebudayaan keraton dipahami memiliki nilai dan makna yang tinggi sehingga sangat layak untuk dijadikan acuan. Hukum-hukum karawitan yang berupa struktur dan bentuk, *laras*, *pathet*, pola tabuhan yang berkembang di keraton sampai saat tetap menjadi acuan bagi masyarakat karawitan pada umumnya.

Seni pertunjukan yang hidup dan berkembang di Keraton Surakarta, termasuk karawitan pada akhirnya mengarah pada konsep *ratu binathara*. Hal ini ditunjukkan dengan penyebutan *iyasan nDalem*<sup>15</sup> pada semua karya-karya seni pertunjukan di keraton. Soedarsono menyatakan konsep *dewaraja* dalam konteks kerajaan Jawa

memiliki kekhasannya sendiri yaitu konsep *ratu binathara*. Penerapan konsep ini pada akhirnya melahirkan konsep estetika seni pertunjukan istana Jawa (Soedarsono, 2001: 23). Bagi seorang raja Jawa sifat ke-*agung-binathara*-an sering ditunjukkan dengan berbagai hal. Seni pertunjukan, bahasa atau apapun oleh raja dapat dijadikan sebagai sarana untuk melegitimasi kekuasaannya. Dapat dikatakan bahwa keberadaan kesenian-kesenian dan hasil kebudayaan keraton merupakan salah satu unsur penegak wibawa raja. Sehingga dapat ditarik satu kesimpulan bahwa konsep estetika seni pertunjukan yang hidup dan berkembang di istana Jawa termasuk Keraton Surakarta merupakan manifestasi dari ideologi raja. Implikasi dari pernyataan itu adalah semua karya seni pertunjukan yang diciptakan mengarah pada usaha memperkuat kedudukan raja atau melegitimasi kekuasaan raja.

##### 5. Raja, Karawitan, dan Upacara Kerajaan

Raja dengan segala kewenangan dan kekuasaannya pada akhirnya tidak bisa berdiri sendiri, harus ada beberapa perangkat yang digunakan untuk menopang kedudukan raja, selanjutnya disebut dengan alat legitimasi. Dengan adanya perangkat-perangkat pendukung legitimasi kekuasaan, maka kedudukan seorang raja menjadi lebih kokoh. Jika kedudukan raja kuat

artinya bebas dari rongrongan orang-orang yang merasa memiliki hak yang sama untuk menduduki tahta, maka jalannya roda pemerintahan relatif lebih aman dari pemberontakan yang akhirnya melanggengkan kekuasaan raja yang memerintah. Sebenarnya konflik yang sering muncul dalam perebutan kekuasaan berasal dari lingkungan internal keluarga kerajaan, artinya pemberontakan terhadap raja disulut oleh saudara-saudara raja. Sejarah mencatat, konflik yang muncul dalam kekuasaan Dinasti Mataram sepeninggal Sultan Agung mayoritas disulut oleh saudara-saudara raja yang memerintah. Karena kedudukan raja sangat rawan terhadap pemberontakan maka legitimasi sangat diperlukan oleh raja yang memerintah. Salah satu alat legitimasi raja di antaranya adalah karawitan, termasuk di dalamnya gamelan berikut *abdi dalem niyaga*.

Karawitan digunakan sebagai salah satu alat legitimasi raja Keraton Surakarta telah berlangsung sejak pemerintahan Paku Buwana II. Sejak saat itu, penciptaan gending sering dikaitkan dengan legitimasi kekuasaan raja, hal ini dapat dilihat pada setiap karya karawitan selalu disebut dengan *iyasan Dalem* yang berarti buatan raja. Sebutan *iyasan Dalem* menunjukkan bahwa kekuasaan seorang raja tidak sekedar berkuasa secara politis, di bidang kesenian raja juga memiliki kekuasaan. Besarnya kekuasaan raja di bidang karawitan semakin diperkuat dengan adanya kepercayaan bahwa

beberapa karya karawitan merupakan ciptaan makhluk halus. Hal ini dikaitkan dengan kemampuan raja yang dapat berhubungan dengan makhluk halus. Banyak gending dipercaya sebagai ciptaan makhluk halus yang dihadiahkan kepada raja. Jika makhluk halus memberi hadiah kepada manusia maka dapat diduga ada hubungan baik antara manusia dengan makhluk halus (Hastanto, 1991: 85).

Salah satu contoh dari kasus di atas, adalah penciptaan gending Gadhung Mlathi. Pada masa pemerintahan Paku Buwana IV di Surakarta terjadi epidemi kolera, banyak kawula Surakarta meninggal dunia termasuk Nyai Jlamprang (seorang abdi dalem penggander wanita). Arwah Nyai Jlamprang merasa dipanggil ke Laut Selatan dan bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul penguasa Laut Selatan. Di alam tersebut, Nyai Jlamprang diberi pelajaran sebuah gending oleh Kanjeng Ratu Kidul, dalam beberapa saat Nyai Jlamprang dapat menguasai gending tersebut. Selanjutnya, Kanjeng Ratu Kidul memerintahkan kepada Nyai Jlamprang untuk menghaturkan gending tersebut kepada Sri Susuhunan. Konon Nyai Jlamprang yang telah meninggal hidup lagi dan menyerahkan Gending Gadung Mlathi kepada raja. Setelah gending Gadung Mlathi dihaturkan kepada raja, maka bencana kolera mereda.<sup>16</sup> Kisah di atas dapat digunakan sebagai salah satu petunjuk bahwa karawitan merupakan salah satu alat legitimasi kekuasaan

raja. Fungsi sebagai alat legitimasi pada akhirnya menjadikan karawitan dapat hidup dan berkembang di keraton.

Satu sisi hubungan yang saling menguntungkan antara raja dan karawitan dimana antara keduanya terdapat hubungan yang saling menguntungkan. Pada lapisan yang lebih dalam dari karawitan, yaitu abdi dalem *niyaga* juga mendapat manfaat dengan adanya simbiosis mutualisme antara raja dan karawitan. Sampai saat ini menjadi abdi dalem *niyaga* merupakan satu nilai tambah bagi seorang seniman karawitan meskipun secara ekonomi tidak dapat dijadikan pegangan hidup, hal ini dikarenakan keraton tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk memberikan gaji yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Kemungkinan mendapat kesempatan menabuh gamelan-gamelan pusaka keraton akan lebih besar jika menjadi abdi dalem *niyaga*, hal inilah yang dimaksud dengan nilai tambah menjadi abdi dalem *niyaga*.

Di sisi lain, *abdi dalem niyaga* yang menjadi penyangga aktivitas karawitan di keraton memerlukan sosok raja sebagai pengayom status sebagai *abdi dalem*.<sup>17</sup> Hal ini dikarenakan seorang

*niyaga* dapat disebut dengan *abdi dalem* jika ada seorang raja yang memerintah atau mengepalai keraton. Tanpa adanya raja, kumpulan *niyaga* tersebut dapat disamakan dengan kelompok *niyaga* pada umumnya, meskipun kelompok *niyaga* tersebut menjalankan aktivitasnya di keraton. Dengan demikian, raja menggunakan karawitan sebagai salah satu alat legitimasi kekuasaannya, sedangkan *niyaga* sebagai pelaksana aktivitas karawitan di keraton memerlukan raja sebagai orang yang dapat melegitimasi status sebagai *abdi dalem niyaga* Keraton.

Dalam sub bab sebelumnya telah diuraikan bahwa selain melalui karawitan, legitimasi kekuasaan seorang raja juga dapat ditunjukkan melalui penyelenggaraan upacara. Seperti halnya antara raja dan karawitan, hubungan antara raja dan upacara kerajaan merupakan simbiosis mutualisme. Hal ini dikarenakan upacara dapat digunakan sebagai salah satu alat legitimasi kekuasaan, oleh karena itu upacara-upacara tradisi keraton tetap dijaga kelangsungannya. Dapat dikatakan tanpa raja upacara tradisi keraton tidak dapat berlangsung,



Bagan 2. Raja dan Komponen Pendukungnya





Bagan 3. Karawitan dan Komponen Pendukungnya

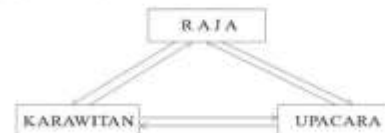


Bagan 4 . Upacara dan Komponen Pendukungnya

karena yang berwenang menyelenggarakan upacara tradisi keraton adalah raja. Upacara tradisi keraton memang dapat diselenggarakan tanpa raja, namun demikian upacara tersebut menjadi tidak sempurna karena beberapa perangkat upacara tidak dapat dikeluarkan tanpa seizin raja (*pikantuk pallah*). Benda-benda yang dianggap pusaka di keraton dipercaya memiliki kekuatan tertentu, hanya seorang raja yang mampu menyatu dengan kekuatan-kekuatan itu karena raja dipercaya sebagai manusia pilihan.

Hidupnya upacara tradisi keraton menjadikan karawitan mendapatkan tempat untuk hidup dan berkembang. Dapat dibayangkan jika upacara *Tinggalan Jumenengan* tidak diselenggarakan lagi, maka dapat dipastikan tidak akan terdengar lagi *Undur-Undur Kajongan* dengan gambang gangsa (*Calapita*), tidak akan ada sajian Bedhaya Ketawang, serta Ladrang Srikaton laras pelog barang yang berbunyi bersamaan dengan peng-

hormatan prajurit. Dengan demikian, hidupnya upacara tradisi keraton memberikan ruang bagi karawitan keraton untuk menunjukkan eksistensinya. Dapat dikatakan jika upacara tradisi keraton hidup, maka karawitan keraton juga mendapat tempat berpijak. Di sisi lain, raja juga semakin kokoh kedudukannya dengan adanya upacara-upacara tradisi keraton serta kehadiran karawitan di dalamnya. Dengan kata lain, terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara raja, karawitan dan upacara tradisi keraton. Hubungan antara ketiganya dapat digambarkan pada bagan 1.



Bagan 1. Jalinan antara Raja, Karawitan dan Upacara yang membentuk sistem

Jalinan antara raja, karawitan, dan upacara tradisi keraton dapat disebut dengan sistem. Hal ini dikarenakan antara ketiganya terdapat hubungan timbal balik yang erat serta kehilangan salah satu dari ketiga unsur tersebut akan mengganggu kelangsungan kehidupan tradisi keraton. Selain itu, ketiga unsur tersebut memiliki bagian-bagian yang lebih kecil sebagai pendukung ketiga unsur itu. Peran pendukung ketiga unsur itu juga sangat menentukan kelangsungan raja, karawitan, dan upacara tradisi keraton. Kehilangan atau tidak berfungsinya salah satu bagian itu juga akan mengganggu stabilitas sistem. Sebuah sistem memiliki bagian-bagian kecil, selanjutnya bagian-bagian kecil itu disebut dengan subsistem. Antara sistem dan subsistem merupakan bagian-bagian yang saling tergantung, artinya antara sistem dan sub sistem tidak dapat berdiri sendiri. Sub-sub sistem itu dapat dilihat pada bagan 2.

Dari bagan di atas terlihat bahwa raja, karawitan maupun upacara masing-masing memiliki komponen pendukung, namun demikian komponen-komponen pendukung itu pada akhirnya menjadi satu kesatuan dan membentuk sistem. Dengan demikian antara raja, karawitan dan upacara tradisi keraton merupakan satu sistem. karena, disebut sistem maka sifat-sifat sistem yang terbentuk dari ketiga unsur tersebut dapat terlihat seperti yang telah diuraikan dalam paragraf sebelumnya. Sifat-sifat itu

diantaranya bahwa semua sistem muncul dari interaksi dan saling tergantung antar bagian. Aktivitas sistem ini melibatkan suatu proses yang dikenal dengan transaksi-interaksi dan saling ketergantungan satu sama lain antar komponen-komponen majemuk (Cafta, 2000: 372).

### Penutup

Sampai saat ini raja masih dipahami memiliki kekuasaan tertinggi meskipun hanya di lingkungan komunitas keraton. Hal ini ditunjukkan dengan dilaksanakannya semua perintah raja serta belum mudahnya pemahaman komunitas keraton tentang perintah raja. Komunitas keraton sampai saat ini masih memahami bahwa mendapat perintah raja dipahami dengan *ngemban dhawuh Dalem* maupun *ndherek kersa Dalem* dan mereka melaksanakannya dengan tulus karena merasa mendapat kehormatan ditunjuk melaksanakan perintah raja. Pemahaman seperti itu pada akhirnya mengarah pada satu pernyataan bahwa sosok seorang raja masih diperlukan di keraton.

Seorang raja tentu saja membutuhkan bermacam perangkat untuk memperkuat kedudukannya, sehingga alat legitimasi kekuasaan mutlak diperlukan, terlebih lagi jika terjadi konflik internal dalam proses alih kekuasaan. Salah satu alat legitimasi kekuasaan raja adalah kebesaran dan kemegahan upacara. Upacara tradisi keraton me-

merlukan berbagai perangkat pendukung upacara diantaranya adalah gamelan. Maka upacara merupakan salah satu alat legitimasi kekuasaan raja dan gamelan merupakan salah satu perangkat upacara, dapat dikatakan gamelan merupakan salah satu alat legitimasi kekuasaan raja. Pembunyian gamelan oleh *abdi dalem niyaga* dalam sebuah upacara merupakan salah satu sarana untuk menunjukkan kebesaran kekuasaan seorang raja. Dengan demikian, sosok raja sangat diperlukan kehadirannya jika dikaitkan dengan upacara kerajaan.

Raja di Keraton Surakarta bukan sekedar kepala komunitas keraton, lebih dari itu seorang raja juga sangat terkait dengan kelangsungan upacara tradisi yang diselenggarakan di keraton. Tanpa raja sebuah upacara tidak akan berlangsung, benda-benda upacara termasuk gamelan tidak dapat dikeluarkan tanpa seizin raja. *Lilah dalem* merupakan kata yang sangat ditunggu dalam setiap aktivitas yang diselenggarakan di keraton. Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara raja, karawitan, dan upacara tradisi keraton. Jalinan antara raja, karawitan, dan upacara tradisi keraton dapat disebut dengan sistem. Hal ini dikarenakan antara ketiganya terdapat hubungan timbal balik yang erat serta kehilangan salah satu dari ketiga unsur tersebut akan mengganggu kelangsungan kehidupan tradisi keraton. Selain itu, ketiga unsur tersebut me-

iliki bagian-bagian yang lebih kecil sebagai pendukung ketiga unsur itu. Peran pendukung ketiga unsur itu juga sangat menentukan kelangsungan raja, karawitan, dan upacara tradisi keraton. Kehilangan atau tidak berfungsinya salah satu bagian itu juga akan mengganggu stabilitas sistem.

#### Catatan Akhir

<sup>1</sup> Klenengan adalah penyajian karawitan mandiri yang tidak terkait dengan bentuk kesenian lain.

<sup>2</sup> Karawitan tari merupakan penyajian karawitan untuk keperluan musik tari.

<sup>3</sup> Peringatan hari kelahiran raja menurut hari pasaran dalam perhitungan kalender Jawa.

<sup>4</sup> Upacara memperingati tiga hari besar Islam yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulud Nabi.

<sup>5</sup> Upacara memperingati turunnya lailatul qodar.

<sup>6</sup> Perayaan dalam rangka peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.

<sup>7</sup> Ulang tahun penobatan raja.

<sup>8</sup> Gamelan yang digunakan pada hari-hari biasa, misalnya upacara penghadapan Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu.

<sup>9</sup> Pawukon dari kata wuku; satu wuku lamanya tujuh hari dan seluruh wuku setahun berjumlah tiga puluh; ulang tahun pawukon seseorang jatuh pada tanggal dan wuku orang itu dilahirkan.

<sup>10</sup> Mahesalawung adalah selamatan yang ditujukan kepada Bathari Durga,

bertempat di hutan Krendhawahana, ditujukan untuk keselamatan seluruh penduduk.

<sup>11</sup> Ngabekten dari kata bekti yang berarti berbakti. Ngabekten adalah tradisi pernyataan bakti kepada orang tua, raja atau ratu dan atasannya dalam rangkaian upacara Garebeg Sawal.

<sup>12</sup> Upacara kenegaraan yang dimaksud adalah upacara yang melibatkan semua komponen kraton, termasuk di dalamnya sentana dalem, abdi dalem dan pejabat istana. Kenegaraan yang dimaksud adalah sebatas pada wilayah kekuasaan kraton saat ini.

<sup>13</sup> Alus=halus.

<sup>14</sup> Istilah Umar Kayam untuk menyebut tradisi besar (kraton).

<sup>15</sup> Ungkapan yang berarti hasil karya, biasanya disertai dengan masa pemerintahan atau zaman penciptaan karya tersebut, iyanan nDalem Sinuwun Paku Buwana X dan seterusnya tergantung kapan karya tersebut diciptakan.

<sup>16</sup> Uraian lebih lengkap dapat dilihat Pradjapangrawit, 1990, hal. 100-105.

<sup>17</sup> Wawancara dengan beberapa abdi dalem niyaga yang telah meng-abdi lebih dari 20 tahun.

#### Daftar Pustaka

- Alan P Merriam, *The Antropology of Music*. Evanston: Northwestern University Press, 1964.
- Aminuddin Kasdi, *Perlawanan Penguasa Madura Atas Hegemoni Jawa*. Yogyakarta: Jendela. 2003.
- Darsiti Soeratman., *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta, 1890-1939*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia. 2000.
- Edi Setyawati, "Kesenian Kraton dan Luar Kraton Pada Masa Hindu-Budha", dalam *Jurnal Kebudayaan Kabanaran*. Yogyakarta: ISI Press, Vol 1. September, 2001
- Fritjof Cafra, *Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan*. Yogyakarta: Yayasan Bentang, Budaya, 2000.
- G. Moedjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa. Penerapannya Bagi Raja-Raja Mataram*. Yogyakarta: Kanisius. 2002.
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Press, 1987.
- Pradjapangrawit, *Wedhapradangga: Serat Sajarah utawi Riwayating Gamelan*. Surakarta: STSI Press, 1990.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, *Teori Sosiolog Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.
- Rustopo, "Keberadaan Karawitan Pada Masa Pemerintahan Paku Buwana X Menurut Serat Sri Karongron", laporan penelitian. Surakarta: STSI, 1995.
- "Keberadaan Karawitan Di Keraton Surakarta Pada Masa Pemerintahan Paku Buwana X", dalam Waridi (ed), *Kehidupan Karawitan Pada Masa Pemerintahan Paku Buwana X, Mangkunagara IV, Dan Informasi Oral*, Surakarta: ISI Press, 2007.

Soedarsono, "Raja dan Seni", dalam  
*Jurnal Kebudayaan Kabanaran*  
Vol. 1. September 2001.  
Yogyakarta: ISI Press, 2001.

Soemarsaid Moertono, *Negara dan  
Usaha Bina Negara di Jawa  
Masa Lampau: Studi Tentang  
Masa Mataram II, Abad XVI  
Sampai XIX.* Jakarta: Yayasan  
Obor Indonesia, 1985

Umar Kayam, *Seni, Tradisi,  
Masyarakat.* Jakarta: Sinar  
Harapan, 1981.

Waridi, *Karawitan Jawa Masa  
Pemerintahan PB X: Perspektif  
Historis dan Teoritis.* Surakarta:  
ISI Press. 2006.